

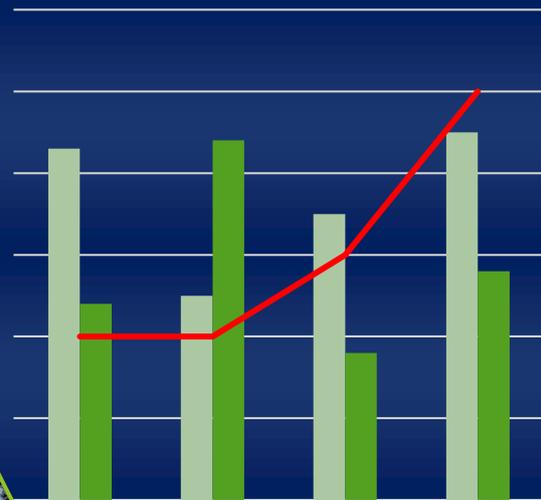


LAPORAN KINERJA 2021

Inspektorat II

Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2021 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan-RB No.53 Tahun 2014, bahwa Laporan Kinerja (Lapkin) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021.

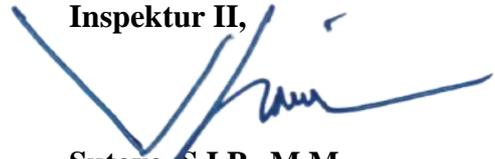
Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2021 menetapkan satu sasaran kegiatan yaitu tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dan lima indikator kinerja kegiatan yang terlampir dalam perjanjian Kinerja Tahun 2021. Secara umum Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut secara teknis diantaranya untuk jadwal pelaksanaan program dan kegiatan belum konsisten. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek pada Tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021.

Jakarta, Desember 2021
Inspektur II,



Sutoyo, S.I.P., M.M.
NIP. 196802151988121000

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp16.060.387.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2021 secara kumulatif daya serap *bruto* sebesar Rp16.049.335.473,- (99,93%), sedangkan daya serap *netto* sebesar Rp15.596.573.184,- (97,11%), selisihnya merupakan pengembalian belanja tahun berjalan sebesar Rp452.762.289,- (2,89%).

Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian sasaran kegiatan tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dengan nilai capaian keuangan sebesar **99,93%**, capaian fisik sebesar **100%**. Berikut tabel capaian Kinerja Inspektorat II:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	35	100,00	285,71%
2	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	35	21,01	60,03%
3	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	75	25,00	33,33%
4	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	Skor	3,2	3,66	114,22%
5	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100	100,00	100,00%

Terdapat beberapa perubahan jadwal pelaksanaan program dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021, sehubungan dengan adanya wabah Corona Virus Diseases 19 (Covid 19). Hal ini tidak sesuai dari yang telah ditentukan awal tahun dan menyebabkan pelaksanaan program selanjutnya tertunda. Akan tetapi secara garis besar seluruh rencana kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dapat dilaksanakan. Atas hal tersebut Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek diharapkan dapat terus berupaya melakukan intensifikasi perencanaan dan pelaksanaan program, dengan melakukan koordinasi secara terus menerus antar Inspektorat dan Bagian, sehingga pelaksanaan program dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT II ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK	5
A Tujuan Strategis RPJMN dan Matrik 2020-2024	5
B Rencana Kinerja Tahunan	6
C Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK	11
A. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021.....	11
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat II Tahun 2021	26
B. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Itjen 2021-2024	5
Tabel 2.2:	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan Itjen 2021-2024)	5
Tabel 2.3:	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat II Tahun 2021	7
Tabel 2.4:	Target Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 Awal	9
Tabel 2.5:	Revisi Target Kinerja Inspektorat II Tahun 2021	10
Tabel 3.1:	Pengukuran Kinerja Inspektorat II Tahun 2020	12
Tabel 3.2:	Pengukuran Kinerja Inspektorat II Tahun 2021	12
Tabel 3.3:	Daya Serap Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2021	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1:	Anggaran Inspektorat II per output Tahun Anggaran 2021	21
Grafik 3.2:	Rencana dan Realisasi Penyerapan Inspektorat II Tahun Anggaran 2021	22
Grafik 3.3:	Penyerapan Anggaran Bulanan dan Persentase Kumulatif Inspektorat II Tahun Anggaran 2021	23
Grafik 3.4:	Revisi Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2021	24
Grafik 4.1:	Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat II Tahun Anggaran 2021	26
Grafik 4.2:	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1:	Struktur Organisasi Inspektorat II	3
Gambar 3.1:	Sebaran Sasaran Pengawasan Inspektorat II Tahun 2021	13
Gambar 3.2:	Kegiatan Tahun 2021 Inspektorat Inspektorat II	13
Gambar 3.3:	Kegiatan Pemantauan Tahun 2021 Inspektorat II	14
Gambar 3.4:	Kegiatan Reviu Tahun 2021 Inspektorat II	14
Gambar 3.5:	Kegiatan Evaluasi Tahun 2021 Inspektorat II	15
Gambar 3.6:	Tahapan Pengawasan BOS	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek memuat pengukuran kinerja dan evaluasi atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbudristek 2020 – 2024.

Pada Tahun 2021, Itjen Kemendikbud mempunyai Program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** dengan 2 (dua) sasaran program serta 6 (enam) Indikator Kinerja Program, untuk mendukung ketercapaian program tersebut, maka Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek memiliki rincian kegiatan Penguatan Pengawasan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dengan sasaran kegiatan **tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek** yang memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

SP1 Terwujudnya system pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

IKP 1.1 Persentase Satker yang berintegritas

IKK 3. Persentase Satker yang Berintegritas di Bidang Kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

IKP 1.4 Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek

IKK 4. Kematangan / maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

IKP 1.5 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP

IKK 5. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

SP 2 Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

IKP 2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi

IKK 1. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

IKP 2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

IKK 2. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Permendikbud No. 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemendikbudristek

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 28 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
3. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5. Pelaksanaan pencegahan korupsi;
6. Pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek;
7. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Gambar berikut ini merupakan penjelasan dari Struktur Organisasi yang terdapat pada Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek.



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

Auditor di Inspektorat II sebanyak 64 orang yang terdiri dari 4 orang Auditor Utama, 19 orang Auditor Madya, 1 orang Auditor Kepegawaian Madya, 14 orang Auditor Muda, 2 orang Auditor Penyelia, 1 orang Auditor Pelaksana Lanjutan, 4 orang Auditor Kepegawaian Pertama, dan 19 orang Auditor Pertama.

D. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit organisasi Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain terkait dengan:

1. Implementasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi (TI).
2. Kegiatan pengawasan yang berfokus pada pencegahan.
3. Pengawasan program-program strategis Kementerian dan Prioritas Nasional.
4. Sinergi Pengawasan, baik antar instansi pusat, daerah, maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
5. Transfer daerah yang semakin besar berupa dana BOS dan DAK tetapi disisi lain terdapat kekosongan dalam pengawasannya yang berpotensi menimbulkan kerugian dan pemborosan keuangan negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Strategis, RPJMN dan Matrik 2020-2024

Tujuan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Perumusan tujuan Itjen ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Kementerian menetapkan lima tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam hal ini, Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan: Peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan tersebut, terdapat indikator kinerja tujuan yang harus dicapai, yaitu :



Tabel 2.1: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Itjen 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							
SP	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						
IKP	Persentase satker yang berintegritas	%	22	75	80	85	90
IKP	Persentase satker yang menerapkan strategi anti fraud	%	7	20	30	40	50
IKP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80	85	87	90	90
IKP	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemdikbud	skor	3,02	3,2	3,3	3,4	3,5
SP	Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan						
IKP	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	%	0	35	65	75	80
IKP	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	%	0	35	65	75	80

Tabel 2.2: Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan Itjen 2021-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	22	75	80	85	90
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	skor	3,02	3,2	3,3	3,4	3,5
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil Kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100	100	100	100	100

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021. Dimana rencana kinerja tersebut merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan juga sebagai awal proses Penetapan Kinerja yang akan dihasilkan selama satu tahun.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Itjen Kemendikbudristek.

Untuk Rencana Kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021, mengacu pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024. Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek akan berusaha untuk mencapai Target Kinerja dan Anggaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Berikut merupakan table Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021 yang terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	35	0	0	0	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	35	0	0	0	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	75	0	0	0	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.2	0	0	0	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100	0	0	0	100

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Layanan Audit Internal Inspektorat II	36	Layanan	13	21	28	36	Rp. 19.112.682.000
2	[051] Pelaksanaan Audit	4	Laporan	2	4	4	4	Rp. 12.354.680.000
3	[052] Pelaksanaan Reviu	8	Laporan	6	6	8	8	Rp. 100.800.000
4	[053] Pelaksanaan Evaluasi	9	Laporan	2	6	7	9	Rp. 2.485.540.000
5	[054] Pelaksanaan Pemantauan	6	Laporan	0	1	4	6	Rp. 2.283.360.000
6	[055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	4	Laporan	2	2	2	4	Rp. 1.320.060.000
7	[056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal	5	Laporan	1	2	3	5	Rp. 568.242.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 19.112.682.000

Tabel 2.3: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat II Tahun 2021

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Inspektur II sebagai pejabat penanggungjawab program dan kegiatan, pada Tahun 2021 telah berjanji kinerja dengan Inspektur Jenderal (Irjen).

Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan, terdapat perubahan target dan indikator kinerja dari yang semula direncanakan dan tertuang pada RKT dengan yang diperjanjikan kinerja. Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024 pada setiap tahunnya, dengan menetapkan lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada Tahun 2021, yaitu:

1. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Tahun 2021 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 35%.
2. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Tahun 2021 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 35%.
3. Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 75%.
4. Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Tahun 2021 mempunyai target skor maturitas sebesar 3,2.
5. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian Laporan Keuangan (LK) minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Tahun 2021 mempunyai target 100% satker dibawah inaan Inspektort II mendapat hasil kajian LK Baik.

Adanya refofusing anggaran mengakibatkan perubahan terhadap Anggaran Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek yang semula Rp19.112.682.000,- menjadi Rp16.060.387.000,-. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek direvisi dibulan November 2021. Berikut uraian target kinerja serta dukungan anggaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja TA 2021 awal dan revisi.

Tabel 2.4: Target Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 Awal

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp. 19.112.682.000
		TOTAL	Rp. 19.112.682.000

Tabel 2.5: Revisi Target Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp. 16.060.387.000
		TOTAL	Rp. 16.060.387.000

BAB III

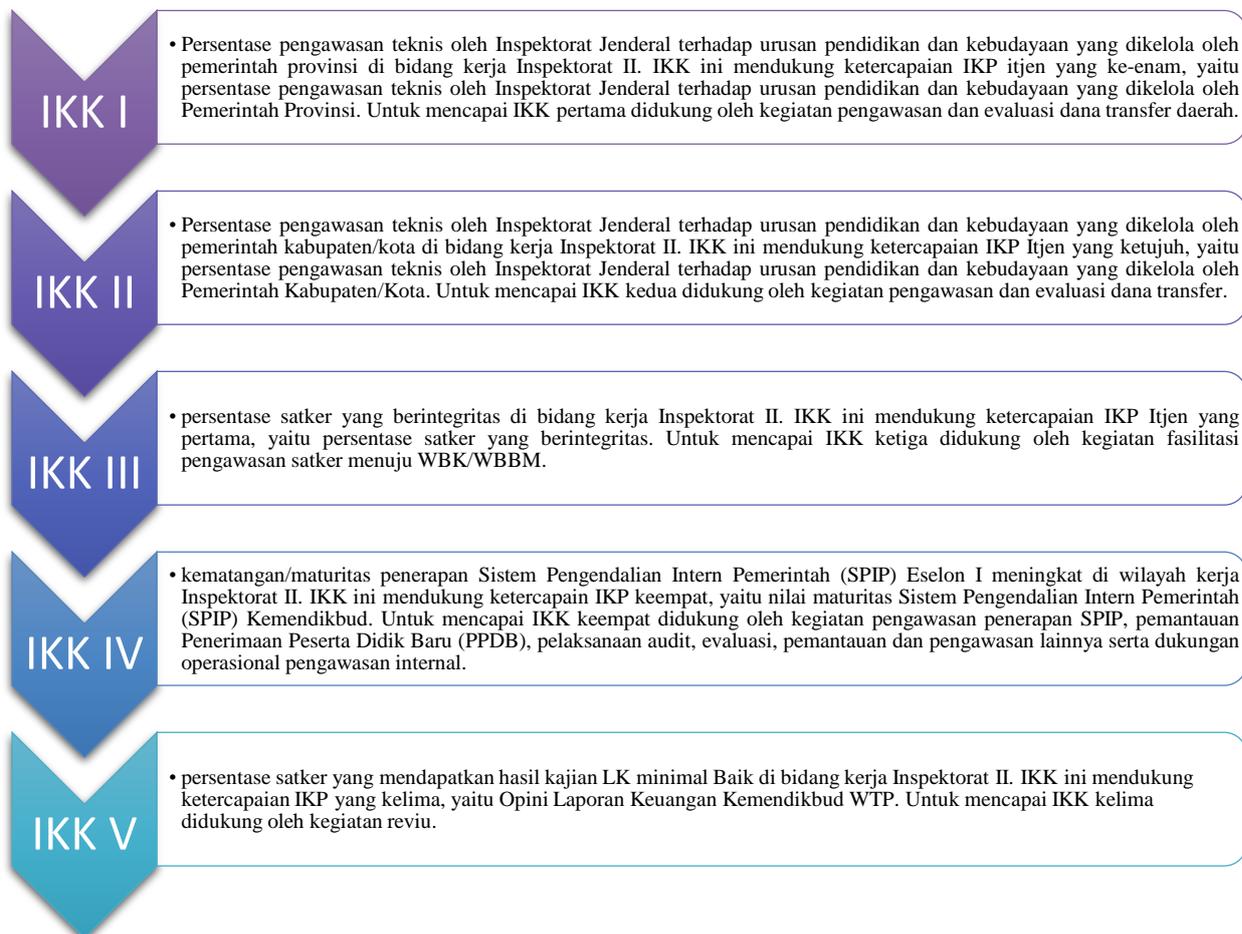
AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek berusaha untuk dapat memenuhi target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran program.

A. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

Pada masing-masing Unit Kerja Eselon II di Itjen mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung tercapainya IKP Itjen Kemendikbudristek. Berikut merupakan penjelasan keterkaitan antar IKK pada Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek terhadap ketercapaian IKP Itjen:

Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek mempunyai lima IKK sebagai berikut:



Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun 2020, tertuang dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Inspektorat II Tahun 2020

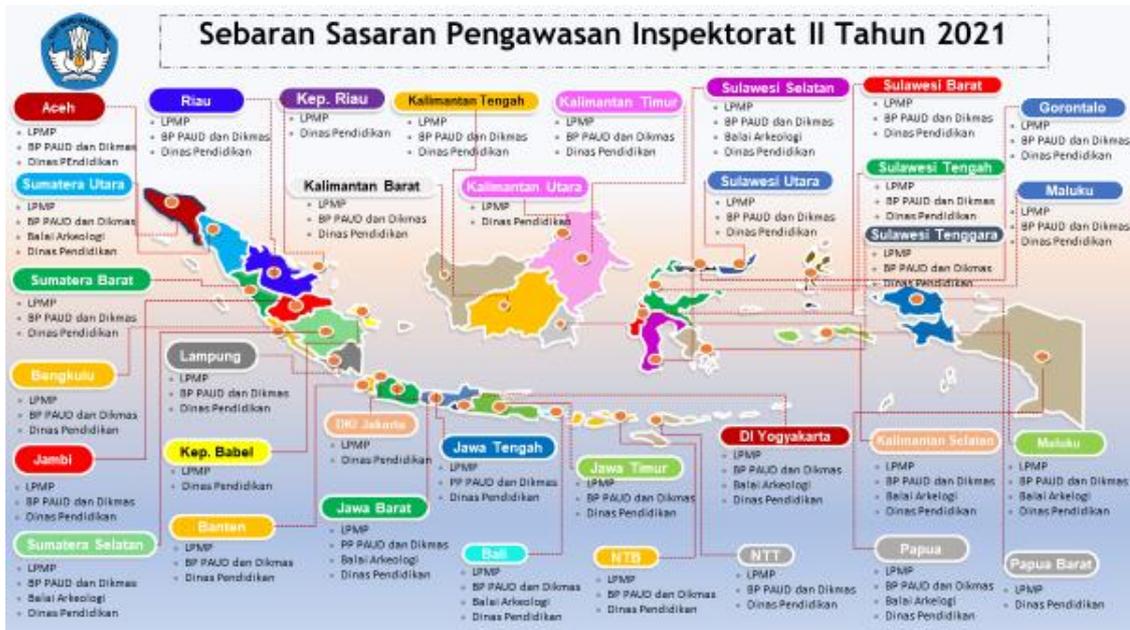
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	20	100,00	500,00%
2	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	20	45,72	228,60%
3	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	70	19,05	27,21%
4	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	Skor	3,1	2,963	95,58%
5	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100	100,00	100,00%

Selama tahun berjalan, terdapat perubahan baik dalam pengalokasian anggaran, maupun program kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Perubahan tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan penambahan jenis kegiatan pengawasan, metode pengawasan serta hal-hal lainnya demi tercapainya sasaran kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Penjelasan tentang penetapan kinerja yang menginformasikan target sasaran kegiatan serta realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek selama Tahun 2021, secara lengkap tertuang dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	35	100,00	285,71%
2	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	35	21,01	60,03%
3	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	75	25,00	33,33%
4	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	Skor	3,2	3,66	114,22%
5	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100	100,00	100,00%

Sampai dengan akhir Tahun 2021 Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada IKK Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek.



Gambar 3.1: Sebaran Sasaran Pengawasan Inspektorat II Tahun 2021



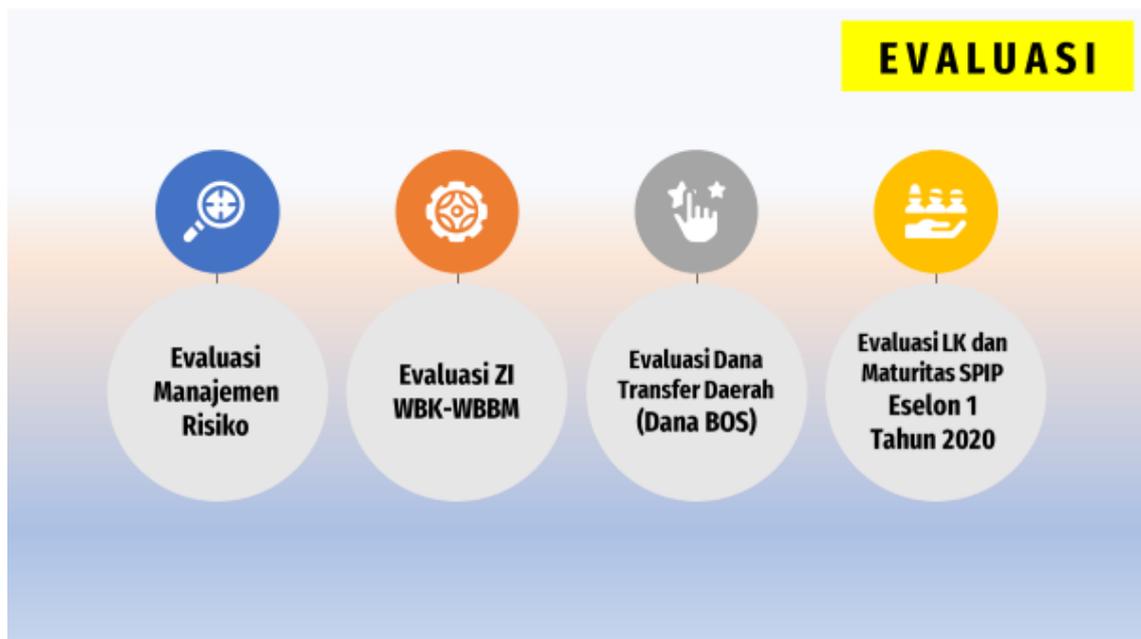
Gambar 3.2: Kegiatan Tahun 2021 Inspektorat II



Gambar 3.3: Kegiatan Pemantauan Tahun 2021 Inspektorat II



Gambar 3.4: Kegiatan Reviu Tahun 2021 Inspektorat II



Gambar 3.5: Kegiatan Evaluasi Tahun 2021 Inspektorat II

1. IKK pertama dan kedua yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek secara simultan dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan teknis atas urusan pendidikan baik program, kebijakan, maupun anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Berikut ini program, kebijakan, maupun anggaran pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang telah diawasi oleh Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2021 yaitu Pengawasan Dana Transfer Daerah. Pada Tahun 2021 pemerintah telah menyalurkan dana BOS sebesar Rp34.476.223.374.000,00 pada tahap 1 dan 2. Dengan besarnya anggaran dana BOS, maka potensi penyimpangan/ penyelewengannya juga sangat tinggi, apalagi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang berada di pusat dan daerah saat ini belum optimal dalam melakukan pengawasan. Agar tingkat penyimpangan atau penyelewengan dana BOS dapat dihapuskan atau dikurangi, dibutuhkan terobosan dalam melakukan pengawasan dana BOS. Terobosan yang harus dilakukan adalah melalui sinergitas pengawasan dana BOS antara APIP pusat dan daerah untuk

melakukan pengawasan mandiri/bersama dengan memanfaatkan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan dana Transfer Daerah berupa BOS Reguler Tahun 2020. Sasaran evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan dana BOS Reguler Tahun 2020 adalah penggunaan dan pemanfaatan terhadap penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Target IKK pertama dan kedua masing-masing 35%. Untuk IKK pertama targetnya 11 Provinsi, namun capaian yang telah diawasi sebanyak 34 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realisasi capaian kinerja IKK pertama sebesar 100% dan capaian persentase dari target IKK pertama sebesar 285,71%.

Untuk IKK kedua target yang diawasi 179 Kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota. Pengawasan yang telah dilaksanakan di 108 kabupaten/kota. Realisasi capaian IKK kedua sebesar 21,01% dan capaian persentase kinerja dari target IKK kedua sebesar 60,03%.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK kedua dikarenakan beberapa kabupaten/kota digolongkan sebagai zona merah covid-19, koordinasi dan komunikasi dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan, serta penyesuaian jadwal dengan petugas eksternal Itjen.

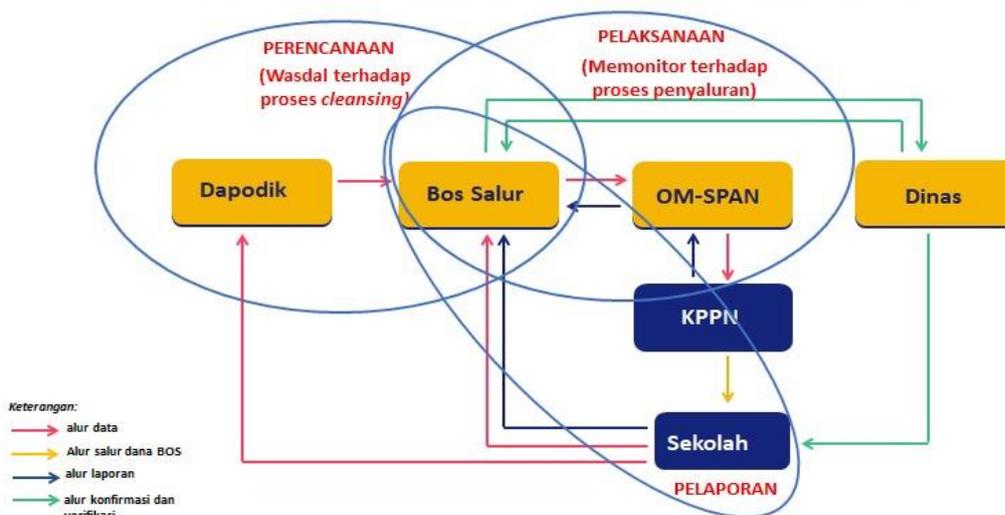
Pengawasan Dana Transfer Daerah dilaksanakan secara bersama antara Auditor Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dan BPKP serta Inspektorat Provinsi Kab/Kota.

Ruang lingkup evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dan Perwakilan BPKP meliputi:

1. Evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan dana BOS Reguler Tahun 2020 pada 2 Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi;
2. Uji petik dilakukan terhadap satuan pendidikan penerima dana BOS Reguler Tahun 2020 dengan jumlah uji petik pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Adapun pelaksanaan Sinergi Pengawasan Dana Operasional Sekolah (BOS) oleh Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dengan APIP daerah (Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota).

AREA DAN TAHAPAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2021
OLEH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK DAN INSPEKTORAT KAB/KOTA



Gambar 3.6: Tahapan Pengawasan BOS

- IKK ketiga yaitu persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek adalah dengan melakukan Evaluasi satuan kerja menuju WBK/WBBM. Selama tahun 2021 kegiatan evaluasi satuan kerja menuju WBK/WBBM dilaksanakan pada 7 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat dan 29 UPT Pusat di daerah yang berada di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, terdiri dari 15 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), 9 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP PAUD), 1 Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) dan 4 Balai Arkeologi.

Berdasarkan surat Nomor 51097/A.A4/OT.01.03/2021 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebanyak 24 satker yang berada di bawah wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Setelah adanya penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 24 Satker yang diusulkan tersebut, ada 6 satker mendapat predikat ZI menuju WBK/WBBM, yaitu Direktorat SMA, BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan, BP PAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan, LPMP Provinsi Banten, LPMP Provinsi Jambi, dan Balar Provinsi D.I. Yogyakarta.

Target Capaian IKK ketiga ini sebesar 75%. Realisasi capaian kinerja sebesar 25,00% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 33,33%.

3. IKK keempat yaitu kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek. Maturitas SPIP adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi, dan akan terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan peraturan dan tujuan organisasi. Inspektorat Jenderal sebagai APIP memiliki peran penting untuk memastikan SPIP dilaksanakan dengan benar pada setiap satker. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP. Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK).

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dalam rangka meningkatkan Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek yaitu dengan melaksanakan kegiatan berupa Pemantauan, Pendampingan, Audit, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi SPIP, dan Evaluasi SAKIP.

Berikut beberapa uraian kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dalam rangka meningkatkan Kematangan/maturitas penerapan SPIP Eselon I di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek:

- a. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian terkait Implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk mengetahui tingkat ketaatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek melakukan verifikasi juknis PPDB yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan dengan cara mencocokkan kesesuaian juknis dengan permendikbud yang dimaksud. Pelaksanaan Pemantauan Sistem PPDB Daring Tahun 2021 dilakukan secara langsung terjun

kelengkapan dengan sasaran pemantauan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring (Online) Tahun 2021 pada 18 Dinas Pendidikan Provinsi dan 23 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Pendampingan penerapan SPIP dan penguatan SPI Satuan Kerja

Mengingat banyaknya jumlah satker yang berada di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek sedangkan terdapat keterbatasan waktu penugasan serta petugas yang dapat dilibatkan, maka kegiatan fasilitasi/konsultasi dilakukan pada satker di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek yang dinilai memiliki risiko tinggi. Setelah dilakukan penilaian risiko, ditetapkan kegiatan pendampingan penerapan SPIP serta pendampingan penguatan SPI Satuan Kerja di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dilakukan pada 16 satker, yang terdiri dari 9 LPMP dan 7 BP PAUD di 14 Provinsi.

c. Pelaksanaan Audit Kinerja.

Tujuan dari dilaksanakannya audit kinerja oleh Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek adalah untuk menilai apakah kinerja dari program-program yang dilakukan oleh satker telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta meyakinkan bahwa program tersebut telah dapat menghasilkan *outcome* sesuai dengan yang diharapkan. Selama tahun 2021 Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Audit Kinerja Bantuan Peralatan TIK Tahun 2020 dan 2021 di 20 Provinsi pada 20 kabupaten/kota di lingkungan Dinas Pendidikan.

Target Capaian IKK keempat ini sebesar 3,2. Skor maturitas SPIP Ditjen Paud dikdasmen 3,55 dan Badan Standar Kurikulum Assesmen Pendidikan (BSKAP) 3,76. Sehingga realisasi capaian kinerja secara rata-rata 3,66 dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 114,22%.

4. IKK kelima yaitu persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek agar satker di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek mendapatkan hasil kajian LK Baik antara lain melakukan pembinaan serta pendampingan satker di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dalam:

- a. Mereviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk tahun anggaran yang akan datang atau yang sedang berjalan, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA K/L satker telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan pagu anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya membantu menteri/pimpinan.
- b. Mereviu penyusunan Laporan Keuangan (LK), untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam LK satker
- c. Mereviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketenguan perencanaan kebutuhan BMN dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan untuk menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
- d. Mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat oleh satker di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, tujuan dilaksanakannya reviu LAKIP yang dibuat oleh satker adalah untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja satker, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja satker sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang baik.

Target Capaian IKK kelima ini sebesar 100%. Kriteria Laporan Keuangan Ditjen Paud Dikdasmen adalah sangat baik dan Badan Standar Kurikulum Assesmen Pendidikan (BSKAP) adalah baik, sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 100%.

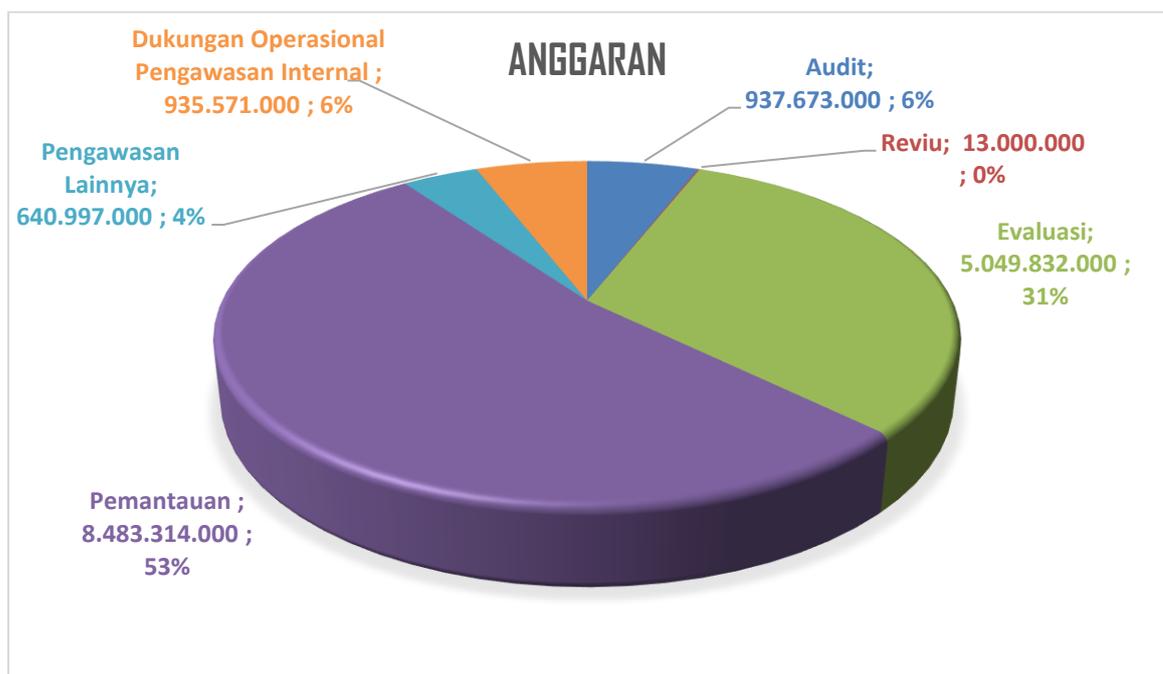
B. Realisasi Anggaran

Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian sasaran kegiatan tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek, dengan indikator kegiatan “Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II”, “Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat II”, “Persentase satker yang

berintegritas di bidang kerja Inspektorat II”, “Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II”, dan “Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II” dengan nilai capaian keuangan sebesar **99,93%**, capaian fisik sebesar **100%**. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19.112.682.000,-, namun seiring tahun berjalan ada perubahan anggaran Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dikarenakan adanya refofusing anggaran menjadi Rp16.060.387.000,-. Sampai dengan akhir 2021 secara kumulatif daya serap bruto sebesar Rp16.049.335.473,- (99,93%), sedangkan daya serap netto sebesar Rp15.596.573.184,- (97,11%), selisihnya merupakan pengembalian belanja tahun berjalan sebesar Rp452.762.289,- (2,89%).

Dibawah ini merupakan tabel dan grafik yang menggambarkan kinerja keuangan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek selama tahun 2021.

Grafik 3.1: Anggaran Inspektorat II per output Tahun Anggaran 2021

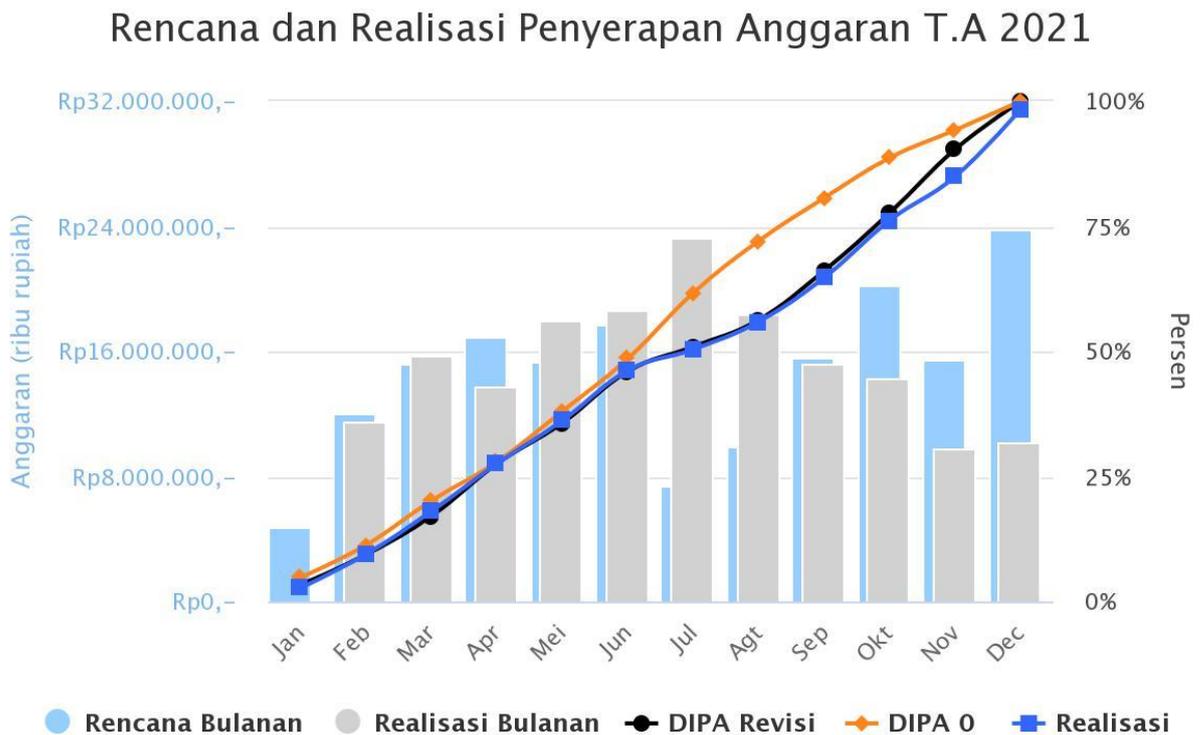


Tabel 3.3: Daya Serap Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2021

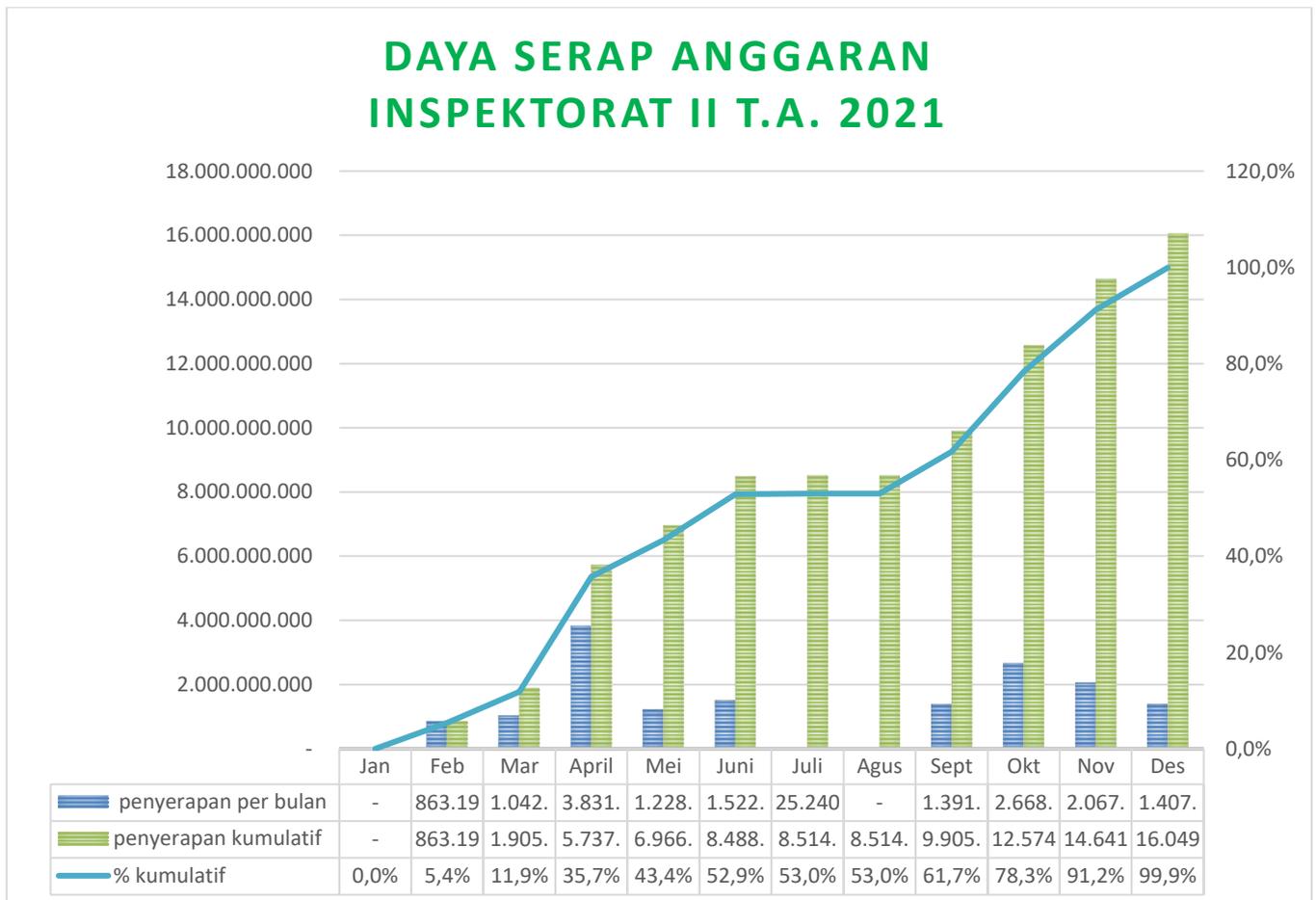
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja						
No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM (SAS)		Realisasi SP2D (SAS)
1	Barang	16.060.387.000	0	16.049.335.473	99,93	16.049.335.473
TOTAL		16.060.387.000	0	16.049.335.473	99,93	16.049.335.473

Realisasi Anggaran per Sub Output - Komponen - Sub Komponen - Akun						
No	Nama Sub Output / Komponen / Sub Komponen / Akun	Pagu	Blokir	Realisasi SPM (SAS)		Realisasi SP2D (SAS)
	[1994] Penguatan Pengawasan Inspektorat II	16.060.387.000	0	16.049.335.473	99,93	16.049.335.473
	[1994.EAK] Layanan Pengawasan Internal	16.060.387.000	0	16.049.335.473	99,93	16.049.335.473
1	[1994.EAK.001] Layanan Audit Internal Inspektorat II	16.060.387.000	0	16.049.335.473	99,93	16.049.335.473
1.1	▶ [051] Pelaksanaan Audit	937.673.000	0	936.772.400	99,90	936.772.400
1.2	▶ [052] Pelaksanaan Reviu	13.000.000	0	13.000.000	100,00	13.000.000
1.3	▶ [053] Pelaksanaan Evaluasi	5.049.832.000	0	5.049.830.231	100,00	5.049.830.231
1.4	▶ [054] Pelaksanaan Pemantauan	8.483.314.000	0	8.477.306.158	99,93	8.477.306.158
1.5	▶ [055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	640.997.000	0	640.995.684	100,00	640.995.684
1.6	▶ [056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal	935.571.000	0	931.431.000	99,56	931.431.000
TOTAL		16.060.387.000	0	16.049.335.473	99,93	16.049.335.473

Grafik 3.2: Rencana dan Realisasi Penyerapan Inspektorat II Tahun Anggaran 2021



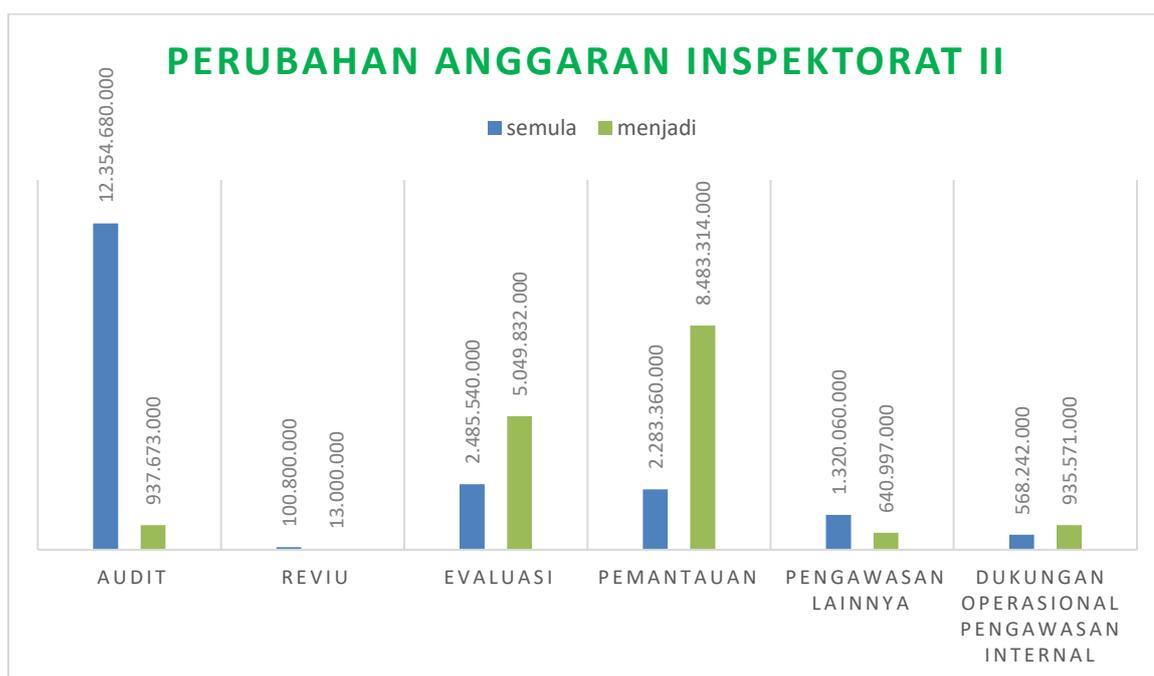
Grafik 3.3: Penyerapan Anggaran Bulanan dan Persentase Kumulatif Inspektorat II Tahun Anggaran 2021



Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya , selama tahun 2021 Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek melakukan beberapa perubahan pada pengalokasian anggaran dan program kegiatan. Perubahan tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan penambahan jenis kegiatan pengawasan, metode pengawasan serta hal-hal lainnya demi tercapainya sasaran kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dan juga mengoptimalkan penyerapan anggaran. Dari hasil revisi anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan baru maupun melanjutkan kegiatan pengawasan yang sudah ada sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih menyeluruh.

Berikut ini info grafis yang dapat menggambarkan efisiensi dan revisi program anggaran yang Inspektorat lakukan, serta optimalisasi anggaran program Inspektorat II di tahun 2021.

Grafik 3.4: Revisi Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2021



Berikut rincian realisasi anggaran untuk masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek:

1. IKK pertama dan kedua yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat II. Untuk mendukung ketercapaian IKK pertama dan kedua, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.904.939.000,- terealisasi sebesar Rp2.904.938.455,- (100%). Dengan penyerapan anggaran sebesar 100% tersebut, realisasi IKK pertama sebesar 100% dan capaian persentase dari target IKK pertama sebesar 285,71%. Serta realisasi IKK kedua sebesar 21,01% dan capaian persentase kinerja dari target IKK kedua sebesar 60,03%.
2. IKK ketiga yaitu persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II. Untuk mendukung ketercapaian IKK ketiga, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.396.586.000,- terealisasi sebesar Rp1.396.585.555,- (100%). Dengan penyerapan anggaran sebesar 100% tersebut, realisasi IKK ketiga sebesar 25,00% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 33,33%.
3. IKK keempat yaitu kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II. Untuk mendukung ketercapaian IKK keempat, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp11.745.862.000,- terealisasi sebesar Rp11.734.811.463 (99,91%). Dengan penyerapan anggaran sebesar

99,91% tersebut, realisasi IKK keempat skor nya 3,66 dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 114,22%.

4. IKK kelima yaitu persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II. Untuk mendukung ketercapaian IKK kelima, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13.000.000,- terealisasi sebesar Rp13.000.000,- (100%). Dengan penyerapan anggaran sebesar 100% tersebut, realisasi IKK kelima sebesar 100% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 100%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

Selama Tahun 2021, Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek berhasil melaksanakan beberapa kegiatan utama serta kegiatan pendukung lainnya hingga mencapai daya serap bruto sebesar **99,93%**, dengan nilai capaian output sebesar **100%**.

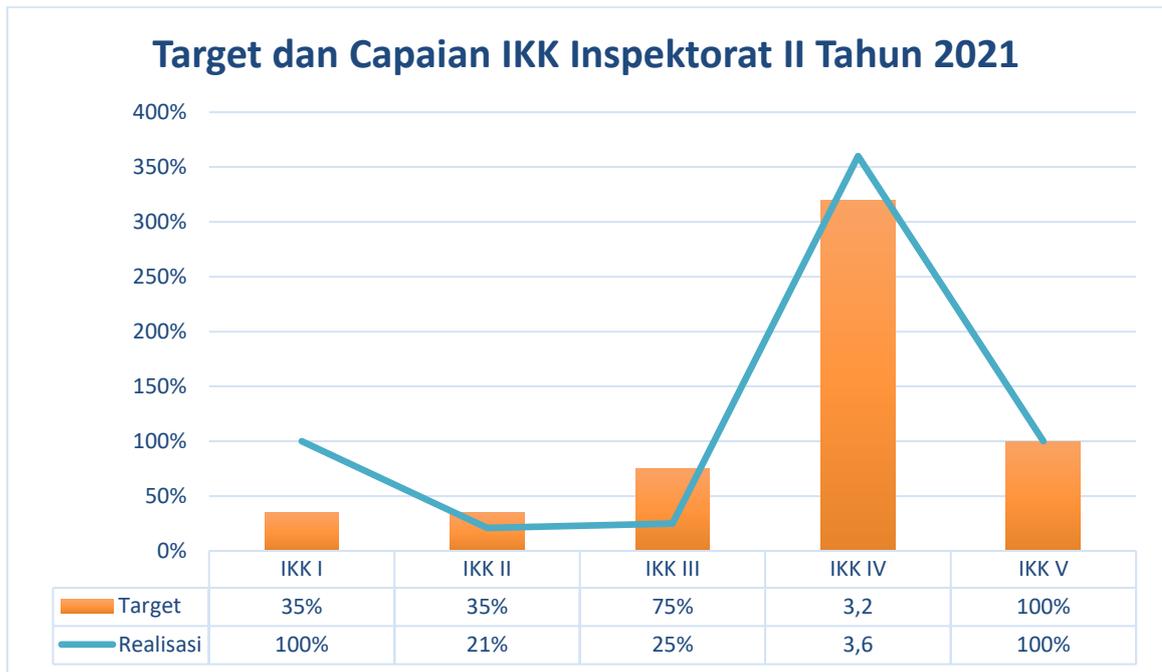
Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti kegiatan utama yaitu Pemantauan, reuiu, evaluasi, audit, pendampingan dan pengawasan lainnya, serta kegiatan pendukung seperti Pelatihan Kantor Sendiri, Penyusunan Pedoman, Kompilasi Hasil Audit dan dukungan operasional pengawasan insternal telah berhasil dilaksanan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut ini grafik yang menggambarkan pencapaian kinerja keuangan dan pencapaian indikator kinerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2020.

Grafik 4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat II Tahun Anggaran 2021



Grafik 4.2 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2021



Catatan :

- IKK 1 =Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat II.
- IKK 2 = Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Inspektorat II.
- IKK 3 = Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II
- IKK 4 = Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II
- IKK 5 = persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II

B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek sampai dengan akhir Desember 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, jadwal kegiatan belum konsisten;
2. Adanya perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang dinamis yang mengharuskan revisi anggaran dalam waktu yang singkat;
3. Belum terjadi sinergi pelaksanaan program antar Inspektorat dan Sekretariat di lingkungan Itjen Kemendikbudristek;
4. Pemanfaatan IT dalam proses audit belum dikuasai secara merata oleh auditor Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek;
5. Penyelesaian laporan hasil audit, pemantauan, revidu belum.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan kedepan antara lain:

1. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi;
2. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap implementasi program agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output dalam jumlah yang tepat sesuai dengan IKK Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek;
3. Mengintensifkan koordinasi antara Sekretariat dengan Inspektorat, agar dapat terjalin kerjasama yang baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
4. Peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi;
5. Meningkatkan peran dan fungsi auditor dalam melakukan revidi laporan secara berjenjang.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Inspektur II
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Subiyantoro

Jabatan : Inspektur II

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 03 Februari 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur II



Subiyantoro

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp. 19.112.682.000
		TOTAL	Rp. 19.112.682.000

Jakarta,03 Februari 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur II



Subiyantoro



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Inspektur II
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sutoyo

Jabatan : Inspektur II

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 07 Desember 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur II



Sutoyo

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp. 16.060.387.000
		TOTAL	Rp. 16.060.387.000

Jakarta,07 Desember 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur II



Sutoyo



**Rencana Aksi
INSPEKTORAT II
Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	35	0	0	0	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	35	0	0	0	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	75	0	0	0	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.2	0	0	0	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100	0	0	0	100

Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Layanan Audit Internal Inspektorat II	36	Layanan	13	21	28	36	Rp. 19.112.682.000
2	[051] Pelaksanaan Audit	4	Laporan	2	4	4	4	Rp. 12.354.680.000
3	[052] Pelaksanaan Reviu	8	Laporan	6	6	8	8	Rp. 100.800.000
4	[053] Pelaksanaan Evaluasi	9	Laporan	2	6	7	9	Rp. 2.485.540.000
5	[054] Pelaksanaan Pemantauan	6	Laporan	0	1	4	6	Rp. 2.283.360.000
6	[055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	4	Laporan	2	2	2	4	Rp. 1.320.060.000
7	[056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal	5	Laporan	1	2	3	5	Rp. 568.242.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 19.112.682.000

Jakarta, 23 April 2021

Inspektur II



Sutoyo



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
INSPEKTORAT II
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	35	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 35	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 100 TW4 : 100	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : masih dalam tahap perencanaan pelaksanaan kegiatan karena belum terjadwalkan di triwulan I. adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Pedoman, Sosialisasi Pedoman, dan uji coba pedoman. Kendala / Permasalahan : pelaksanaan kegiatan direncanakan di triwulan II dan III, karena adanya penyesuaian jadwal kegiatan di Inspektorat II Strategi / Tindak Lanjut : dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : -Dalam mempersiapkan Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan rangkaian kegiatan berupa 1)Diseminasi Pedoman PPDB, 2) Penyusunan Pedoman PPDB, 3)FB Penyempurnaan Pedoman PPDB, 4)PKS Pemantauan PPDB, 5)Perjadin Pemantauan Sistem Aplikasi PPDB Online dan Offline. -Dalam mempersiapkan Pengawasan Dana Transfer Daerah dilaksanakan rangkaian kegiatan berupa 1) Penyusunan Pedoman Pengawasan Dana Transfer Daerah, 2) PKS Pemantauan Dana Transfer Daerah, 3)Perjadin Pemantauan Dana Transfer Daerah oleh Auditor Itjen dan BPKP Perwakilan, 4) Perjadin QA Pemantauan Dana Transfer Daerah oleh BPKP Pusat, 5) Kompilasi Internal dan Nasional Hasil Pemantauan Dana Transfer Daerah, 6) Finalisasi Kompilasi Hasil Pemantauan Dana Transfer Daerah, 7)Ekspose Internal Hasil Pemantauan Dana Trasfer Daerah. Kendala / Permasalahan : -adanya reconfusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. -kendala dalam koordinasi dan komunikasi dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan. -penyesuaian jadwal dengan petugas eksternal Itjen. -masih terkendala dengan covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : -merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan program dan ketentuan, -memaksimalkan media komunikasi yang tersedia baik secara Daring ataupun Luring, -melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : 1) dilaksanakan PKS bertema NSPK Pemda, PPDB, dan Pengawasan serta evaluasi Dana Transfer Daerah, 2)dilaksanakan penyusunan pedoman bertema PPDB, dan Pengawasan serta evaluasi Dana Transfer Daerah, 3)dilaksanakannya pemantauan PPDB dan Pengawasan Dana Transfer daerah, 4)dilaksanaan Kompilasi Hasil Laporan terkait PPDB dan Pengawasan Dana Transfer daerah Kendala / Permasalahan : -adanya reconfusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. -kendala dalam koordinasi dan komunikasi dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan. -penyesuaian jadwal dengan petugas eksternal Itjen. -masih terkendala dengan covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan program dan ketentuan, memaksimalkan media komunikasi yang tersedia baik secara Daring ataupun Luring, melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : telah tercapai di TW III Kendala / Permasalahan : tidak ada permasalahan Strategi / Tindak Lanjut : tidak ada tindak lanjut</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	35	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 35	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 20 TW4 : 21	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : masih dalam tahap perencanaan pelaksanaan kegiatan karena belum terjadwalkan di triwulan I. adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Pedoman, Sosialisasi Pedoman, dan uji coba pedoman. Kendala / Permasalahan : pelaksanaan kegiatan direncanakan di triwulan II dan III, karena adanya penyesuaian jadwal kegiatan di Inspektorat II Strategi / Tindak Lanjut : dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : -Dalam mempersiapkan Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan rangkaian kegiatan berupa 1)Diseminasi Pedoman PPDB, 2) Penyusunan Pedoman PPDB, 3)FB Penyempurnaan Pedoman PPDB, 4)PKS Pemantauan PPDB, 5)Perjadin Pemantauan Sistem Aplikasi PPDB Online dan Offline. -Dalam mempersiapkan Pengawasan Dana Transfer Daerah dilaksanakan rangkaian kegiatan berupa 1) Penyusunan Pedoman Pengawasan Dana Transfer Daerah, 2) PKS Pemantauan Dana Transfer Daerah, 3)Perjadin Pemantauan Dana Transfer Daerah oleh Auditor Itjen dan BPKP Perwakilan, 4) Perjadin QA Pemantauan Dana Transfer Daerah oleh BPKP Pusat, 5) Kompilasi Internal dan Nasional Hasil Pemantauan Dana Transfer Daerah, 6) Finalisasi Kompilasi Hasil Pemantauan Dana Transfer Daerah, 7)Ekspose Internal Hasil Pemantauan Dana Trasfer Daerah. Kendala / Permasalahan : -adaanya recofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. -kendala dalam koordinasi dan komunikasi dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan. -penyesuain jadwal dengan petugas eksternal Itjen. -masih terkendala dengan covid-19. Strategi / Tindak Lanjut : -merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan program dan ketentuan, -memaksimalkan media komunikasi yang tersedia baik secara Daring ataupun Luring, -melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : 1) dilaksanaan PKS bertema NSPK Pemda, PPDB, dan Pengawasan serta evaluasi Dana Transfer Daerah, 2)dilaksanakan penyusunan pedoman bertema PPDB, dan Pengawasan serta evaluasi Dana Transfer Daerah, 3)dilaksanakanya pemantauan PPDB dan Pengawasan Dana Transfer daerah, 4)dilaksanaan Kompilasi Hasil Laporan terkait PPDB dan Pengawasan Dana Transfer daerah Kendala / Permasalahan : -adaanya recofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. -kendala dalam koordinasi dan komunikasi dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan. -penyesuain jadwal dengan petugas eksternal Itjen. -masih terkendala dengan covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan program dan ketentuan, memaksimalkan media komunikasi yang tersedia baik secara Daring ataupun Luring, melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : 1) PKS bertema Pengawasan serta evaluasi Dana Transfer Daerah, 2)pelaksanaan Rakor Evaluasi dana transfer daerah Kendala / Permasalahan : -upaya pemaksimalan serapan anggaran. -kendala dalam koordinasi dan komunikasi dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan. - penyesuain jadwal dengan petugas eksternal Itjen. - masih terkendala dengan covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan program dan ketentuan, memaksimalkan media komunikasi yang tersedia baik secara Daring ataupun Luring, melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p>
---	--	--	---	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	%	75	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 75	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 25	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : belum ada proges kegiatan apapun dikarenakan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan di triwulan III. Kendala / Permasalahan : penyesuaian jadwal kegiatan di lingkungan Inspektorat II Strategi / Tindak Lanjut : melakukan pembinaan dan pendampingan pada satker-satker yang akan diusulkan sebagai satker yg berpredikat WBK dan/ WBBM</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Dilaksanakanya 1)Diseminasi Pedoman Evaluasi ZI WBK/WBBM, 2)Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM Satker, 3) PKS Evaluasi ZI WBK/WBBM, 4) Perjadin Evaluasi ZI WBK/WBBM. Kendala / Permasalahan : -penyesuaian jadwal kegiatan di lingkungan Inspektorat II. -masih terkendala dengan wabah covid-19 -ada beberapa auditor Inspektorat II yang terpapar Virus Covid-19. -adanya recofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. Strategi / Tindak Lanjut : -menyesuaikan jadwal kegiatan, -melakukan pembinaan dan pendampingan pada satker-satker yang akan diusulkan sebagai satker yg berpredikat WBK dan/ WBBM, -menugaskan petugas dari unit diluar Inspektorat II yang kompeten. -melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19. -kegiatan Pemantauan Satker Berpredikat ZI-WBK/WBBM menjadi tugas dan fungsinya tim sekretariat itjen. maka kegiatan pemantauan di Inspektorat II anggarannya di alihkan ke dalam evaluasi zi wbk.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Dilaksanakanya 1)Diseminasi Pedoman Evaluasi ZI WBK/WBBM, 2)Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM Satker, 3) PKS Evaluasi ZI WBK/WBBM, 4) Perjadin Evaluasi ZI WBK/WBBM. Kendala / Permasalahan : penyesuaian jadwal kegiatan di lingkungan Inspektorat II, masih terkendala dengan wabah covid-19 karena beberapa auditor Inspektorat II yang terpapar Virus Covid-19. adanya recofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. Strategi / Tindak Lanjut : menyesuaikan jadwal kegiatan, melakukan pembinaan dan pendampingan pada satker-satker yang akan diusulkan sebagai satker yg berpredikat WBK dan/ WBBM, menugaskan petugas dari unit diluar Inspektorat II yang kompeten. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19. kegiatan Pemantauan Satker Berpredikat ZI-WBK/WBBM menjadi tugas dan fungsinya tim sekretariat itjen. maka kegiatan pemantauan di Inspektorat II anggarannya di alihkan ke dalam evaluasi zi wbk</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dilaksanakanya Desk Evaluasi ZI WBK/WBBM Satker Kendala / Permasalahan : penyesuaian jadwal kegiatan di lingkungan Inspektorat II, masih terkendala dengan wabah covid-19, kesiapan satker dalam penialaian ZI WBK/WBBM Strategi / Tindak Lanjut : menyesuaikan jadwal kegiatan, melakukan pembinaan dan pendampingan pada satker-satker yang akan diusulkan sebagai satker yg berpredikat WBK dan/ WBBM, menugaskan petugas dari unit diluar Inspektorat II yang kompeten. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19. kegiatan Pemantauan Satker Berpredikat ZI-WBK/WBBM menjadi tugas dan fungsinya tim sekretariat itjen. maka kegiatan pemantauan di Inspektorat II anggarannya di alihkan ke dalam evaluasi zi wbk</p>
---	--	---	---	----	---	---	--

4	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	nilai	3.2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 3.2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 3.6	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : pelaksanaan kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP Es 1 TA 2020, Perjadin Pendampingan Penerapan SPIP dan SPI Satker, Perjadin Evaluasi Manajemen Risiko, selain itu melaksanakan kegiatan penyusunan dan sosialisasi pedoman dalam rangka persiapan kegiatan audit, evaluasi dan pemantauan program Inspektorat II</p> <p>Kendala / Permasalahan : adanya refofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. keterlambatan dalam pencairan TUP sehingga beberapa pembayaran kegiatan tertunda.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : merevisi anggaran Inspektorat II dan penyesuaian jadwal kegiatan. mengajukan pencairan TUP sesegera mungkin.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Dilaksanakannya 1)Fact Finding Keselarasan SKB 3 Menteri, 2) Penyusunan Pedoman Pemantauan SPK, 3)PKS Program Kementrian - Sekolah Penggerak, 4) Rapat Internal dengan tema Hasil Fact Finding SKB, Persiapan Kompilasi Nasional Pemantauan Dana Transfer Daerah, dan terkaiat Tata Usaha Inspektorat II</p> <p>Kendala / Permasalahan : -adanya refofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. -masih terkendala dengan wabah covid-19.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : -merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, -melaksanakan kegiatan melalui aplikasi online. -melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Dilaksanakannya 1)Fact Finding Keselarasan SKB 3 Menteri, 2) Penyusunan Pedoman, 3)PKS 4) Rapat Internal Inspektorat II, 5)pengawasan, audit, evaluasi, pemantauan dan atau pendampingan</p> <p>Kendala / Permasalahan : adanya refofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen. masih terkendala dengan wabah covid-19.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, melaksanakan kegiatan melalui aplikasi online. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dilaksanakannya 1)Penyusunan Pedoman, 2)PKS 4) Rapat Internal Inspektorat II, 5)pengawasan, audit, evaluasi, pemantauan dan atau pendampingan</p> <p>Kendala / Permasalahan : pemaksimalan daya serap anggaran, masih terkendala dengan wabah covid-19.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : merevisi anggaran Inspektorat II sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, melaksanakan kegiatan melalui aplikasi online. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.</p>
---	--	--	-------	-----	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5	[SK 1.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 100	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 100	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : melaksanakan kegiatan Reviu PIPK eselon 1 Tahun 2020, Reviu LK dan LAKIP Ditjen Paud Dikdasmen dan Balitbang Perbukuan Kendala / Permasalahan : Ketepatan Satker menuangkan Laporan Keuangan dan pemahaman dalam kepatuhan Pengendalian Intern Laporan Keuangan Strategi / Tindak Lanjut : melakukan koordinasi untuk memberi masukan sebagai upaya perbaikan pengendalian intern Laporan Keuangan kepada satker.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : beberapa Reviu telah dilaksanakan di Triwulan I, untuk Triwulan II tidak terjadwalkan. Dan kegiatan reviu selanjutnya dijadwalkan di triwulan III dan atau IV Kendala / Permasalahan : belum adanya jadwal kegiatan yang pasti karena masih terkendala dengan Covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : mengkoordinasikan dan menyesuaikan jadwal kegiatan Inspektorat II secara Daring</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : melaksanakan kegiatan Reviu PIPK eselon 1 Tahun 2020, Reviu LK, LAKIP dan RKA- K/L Ditjen Paud Dikdasmen dan Balitbang Perbukuan, Kendala / Permasalahan : belum adanya jadwal kegiatan yang pasti karena masih terkendala dengan Covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : mengkoordinasikan dan menyesuaikan jadwal kegiatan Inspektorat II</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Reviu LK, RKBMN dan RKA- K/L Ditjen Paud Dikdasmen dan BSKAP. Kendala / Permasalahan : belum adanya jadwal kegiatan yang pasti karena masih terkendala dengan Covid-19 Strategi / Tindak Lanjut : mengkoordinasikan dan menyesuaikan jadwal kegiatan Inspektorat II</p>
---	--	--	---	-----	--	--	---

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Layanan Audit Internal Inspektorat II	33	Layanan	11	18	23	33	Rp. 16.060.387.000
2	[051] Pelaksanaan Audit			0	0	0	1	Rp. 937.673.000
3	[052] Pelaksanaan Reviu			4	4	6	10	Rp. 13.000.000
4	[053] Pelaksanaan Evaluasi			4	5	7	9	Rp. 5.049.832.000
5	[054] Pelaksanaan Pemantauan			0	5	5	6	Rp. 8.483.314.000
6	[055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya			2	2	2	2	Rp. 640.997.000
7	[056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal			1	2	3	5	Rp. 935.571.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 16.060.387.000

Jakarta,19 Januari 2022

Inspektur II



Sutoyo



**Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2022**

Satuan Kerja : INSPEKTORAT II

Unit Utama : INSPEKTORAT JENDERAL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Kegiatan	Alokasi 2022
[1994.01] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[1994.01] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	65	[1994] Penguatan Pengawasan Inspektorat II	19.523.530.000
	[1994.02] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	65		
	[1994.03] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II	80		
	[1994.04] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.3		
	[1994.05] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	100		

Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output [KRO]	Target Klasifikasi Rincian Output [KRO]	Rincian Output [RO]	Komponen
[1994] Penguatan Pengawasan Inspektorat II	[1994.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal	51	[1994.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	[1994.EBD.001.052] Pelaksanaan Reviu
			[1994.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	[1994.EBD.002.052] Pelaksanaan Reviu
				[1994.EBD.002.053] Pelaksanaan Evaluasi
				[1994.EBD.002.054] Pelaksanaan Pemantauan
			[1994.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	[1994.EBD.003.053] Pelaksanaan Evaluasi
				[1994.EBD.003.054] Pelaksanaan Pemantauan
			[1994.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	[1994.EBD.004.051] Pelaksanaan Audit
				[1994.EBD.004.053] Pelaksanaan Evaluasi
				[1994.EBD.004.054] Pelaksanaan Pemantauan
				[1994.EBD.004.055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya
			[1994.EBD.004.056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal	

Jakarta, 23 Juli 2021

Inspektur II



Sutoyo



Nomor : 51097/A.A4/OT.01.03/2021

22 Juli 2021

Hal : Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mengusulkan unit kerja sebagai berikut.

A. Usulan Unit Kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

1. Biro Hukum
2. Biro Organisasi dan Tata Laksana
3. Biro Sumber Daya Manusia
4. Pusat Penguatan Karakter
5. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan
6. PPPPTK Bidang Bahasa
7. PPPPTK Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa
8. PPPPTK Bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
10. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
11. Direktorat Sekolah Menengah Atas
12. BPPAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan
13. BPPAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan
14. BPPAUD Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Barat
15. BPPAUD Dikmas Provinsi Aceh
16. LPMP Provinsi Bangka Belitung
17. LPMP Provinsi Kalimantan Selatan
18. LPMP Provinsi Gorontalo
19. LPMP Provinsi Sumatera Selatan
20. LPMP Provinsi Banten
21. LPMP Provinsi Bengkulu

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

22. LPMP Provinsi Jambi
23. LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
24. LPMP Provinsi Aceh
25. LPMP Provinsi Sumatera Utara
26. LPMP Provinsi Kepulauan Riau
27. LPMP Provinsi Sulawesi Tengah
28. BBPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
29. Politeknik Negeri Bali
30. Politeknik Negeri Jakarta
31. Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya
32. Politeknik Negeri Batam
33. Politeknik Negeri Lhokseumawe
34. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
35. Politeknik Negeri Pontianak
36. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
37. Politeknik Manufaktur Bandung
38. Politeknik Negeri Ketapang
39. Politeknik Negeri Padang
40. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
41. Universitas Sumatera Utara (Fakultas Keperawatan)
42. Universitas Andalas (Fakultas Teknik)
43. Universitas Riau (Fakultas Keperawatan)
44. Universitas Indonesia (Fakultas Kesehatan Masyarakat)
45. Universitas Padjadjaran (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
46. Universitas Diponegoro (Fakultas Teknik)
47. Universitas Airlangga (Fakultas Psikologi)
48. Universitas Brawijaya (Fakultas Teknologi Pertanian)
49. Universitas Gajah Mada (Fakultas Teknik)
50. Universitas Tanjungpura (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
51. Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Teknik)
52. Universitas Hasanuddin (Fakultas Ilmu Budaya)
53. Universitas Sam Ratulangi (Fakultas Teknik)
54. Universitas Pendidikan Indonesia (Fakultas Pendidikan IPS)
55. Institut Teknologi Bandung (Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika)
56. Institut Teknologi Sepuluh November (Fakultas Sains dan Analitika Data)
57. Universitas Sriwijaya (Fakultas Hukum)
58. Universitas Negeri Malang (Fakultas IPA)
59. Universitas Negeri Padang (Fakultas Matematika dan IPA)
60. Universitas Negeri Medan (Fakultas Matematika dan IPA)
61. Universitas Trunojoyo Madura (Fakultas Keislaman)
62. Universitas Siliwangi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
63. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
64. Universitas Singaperbangsa Karawang (Fakultas Ekonomi)
65. Universitas Lampung (Fakultas Kedokteran)
66. Universitas Bengkulu (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
67. Universitas Negeri Semarang (Fakultas Teknik)
68. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
69. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

70. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
71. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
72. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
73. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
74. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali
75. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
76. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur
77. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan
78. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta
79. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat
80. Galeri Nasional Indonesia
81. Balai Konservasi Borobudur
82. Museum Kebangkitan Nasional
83. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
84. Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta
85. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
86. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

B. Usulan Unit Kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2. BPPAUD Dikmas Provinsi Jawa Timur
3. LPMP Provinsi Jawa Timur
4. LPMP Provinsi Riau
5. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri
6. Pusat Asesmen dan Pembelajaran
7. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Tim Penilai Nasional (TPN) dapat melakukan evaluasi atas unit kerja tersebut.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na`im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

**APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
TAHUN 2021**

Kepada Yth.

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mengundang Saudara/i dalam Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas
untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi

MAKING CHANGE, MAKING HISTORY

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
Waktu : 08.30 WIB
Venue Online : Zoom Meeting (perhatikan ketentuan penghargaan online)
Dress Code : Pakaian Dinas Harian

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo

INFORMASI DAN KETENTUAN PENGHARGAAN ONLINE

- A. Harap melakukan konfirmasi kehadiran mulai tanggal 18-19 Desember 2021 melalui konfirmasi.menpan.go.id
- B. Awardee **TIDAK PERLU** datang fisik ke tempat acara di Jakarta
- C. Acara Penghargaan melalui Zoom Meeting dapat diikuti melalui tautan link <https://tinyurl.com/AnugerahZonaIntegritas2021> (Passcode: ZI2021)
- D. Awardee **WAJIB** memasuki undangan Zoom Meeting paling lambat 30 menit sebelum acara penghargaan dimulai
- E. Awardee diharapkan memastikan kondisi jaringan internet dalam keadaan stabil.
- F. Akun Zoom Meeting Awardee WAJIB menggunakan format: (Kode unit kerja agar tidak disebarluaskan pada sosial media): NO KODE UNIT_NAMA INSTANSI_NAMA UNIT KERJA (contoh: A001_KEMENTERIAN KEUANGAN_KPP LHOKSE-UMAWE)
- G. Apabila format nama tidak sesuai, **TIDAK** diperkenankan masuk pada sesi penghargaan.
- H. Jumlah maksimal akun yang dapat bergabung untuk 1 unit kerja adalah sebanyak 1 akun. Dalam hal ini penggunaan ruang yang sama saat mengikuti acara penghargaan, diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
- I. Pada acara penghargaan, Awardee diharapkan untuk menjaga lingkungan sekitar tetap kondusif dan menggunakan fitur **mute microphone** serta selalu **menyalakan video**
- J. Kelengkapan acara penghargaan dapat diunduh melalui tautan bit.ly/zonaintegritas21

**Kepada Yth. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kepada Pimpinan Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021

KODE UNIT	UNIT KERJA
B3A01	Biro Sumber Daya Manusia
B3B01	Direktorat SMA
B3B02	LPMP Provinsi Jambi
B3B03	LPMP Banten
B3B04	BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan
B3B05	BP PAUD dan DIKMAS Sulawesi Selatan
B3C01	Fakultas Teknik-Universitas Diponegoro
B3C02	Fakultas Teknik-Universitas Gadjah Mada
B3C03	Fakultas Teknologi Pertanian-Universitas Brawijaya
B3C04	Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Padjadjaran
B3C05	Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Indonesia
B3C06	Politeknik Manufaktur Bandung
B3C07	Politeknik Negeri Batam
B3D01	Galeri Nasional Indonesia
B3D02	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta
B3D03	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta

RUNDOWN ACARA

JAM	OFFLINE	ONLINE
07.00-08.00	Registrasi dan <i>coffee morning</i>	Registrasi dan <i>screening</i>
08.00-08.05	Pemanggilan para penerima dan tamu undangan untuk memasuki ruang acara	
08.05-08.30	Tamu undangan non-VVIP memasuki ruang acara	
	Tamu undangan VVIP diarahkan di ruang transit VVIP	
08.30-08.40	Tamu Undangan VVIP memasuki ruang acara	Seluruh peserta menyalakan video
	Penyambutan atas tamu undangan dan penerima penganugerahan	
08.40-08.45	Wakil Presiden RI hadir secara online	
08.45-08.50	Menyanyikan Indonesia Raya	
08.50-08.55	Pembacaan Doa	
08.55-09.00	Opening oleh MC	
09.00-09.05	MC Prolog	
09.05-09.12	Laporan Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Kementerian PANRB	
09.12-09.22	Pengarahan dari Wakil Presiden RI	
	Prolog MC	
09.22-09.27	Video (5 Menit) : Terobosan, Keberhasila dan Hasil nyata beberapa unit kerja WBK/WBBM seerta testimony	
09.27-09.30	Prolog MC	
09.30-09.40	Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
09.40-09.50	Penyerahan Apresiasi Kepada Pemimpin Perubahan	
09.50-10.45	Penyerahan anugerah predikat WBK dan WBBM kepada Unit Kerja simbolis secara offline	
10.15-10.45	Tayangan Penerima Penghargaan ZI WBK WBBM Online	
10.45-10.50	MC Closing	

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Bulan: Januari 2021 - Desember 2021

Format : B.19
Nama Satker : INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUK

Dana DIPA : Rp 16.060.387.000
Realisasi : Rp 16.049.335.473
Keuangan : 99,93%
Fisik :

Kode	Uraian	Sasaran			Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total			Sisa Anggaran	Blokir		
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%					
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II				0	0	16.060.387.000	16.049.335.473	0	0	0	0	16.060.387.000	16.049.335.473	99,93	11.051.527	0	4. Kegiatan	
1994.EAK	Layanan Pengawasan Internal	Laporan	33	33	100	0	0	16.060.387.000	16.049.335.473	0	0	0	0	16.060.387.000	16.049.335.473	99,93	11.051.527	0	5. Output
1994.EAK.001	Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	33	33	100	0	0	16.060.387.000	16.049.335.473	0	0	0	0	16.060.387.000	16.049.335.473	99,93	11.051.527	0	6. Sub Output
051	Pelaksanaan Audit				0	0	937.673.000	936.772.400	0	0	0	0	937.673.000	936.772.400	99,9	900.600	0	7. Komponen	
051.A	Penyusunan Pedoman				0	0	99.050.000	99.050.000	0	0	0	0	99.050.000	99.050.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	100	0	0	9. Akun	
522151	Belanja Jasa Profesi				0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	100	0	0	9. Akun	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				0	0	90.350.000	90.350.000	0	0	0	0	90.350.000	90.350.000	100	0	0	9. Akun	
051.C	Audit Kinerja Program Berkelanjutan				0	0	838.623.000	837.722.400	0	0	0	0	838.623.000	837.722.400	99,89	900.600	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100	0	0	9. Akun	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				0	0	9.750.000	9.750.000	0	0	0	0	9.750.000	9.750.000	100	0	0	9. Akun	
522151	Belanja Jasa Profesi				0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100	0	0	9. Akun	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0	0	775.573.000	775.572.400	0	0	0	0	775.573.000	775.572.400	100	600	0	9. Akun	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				0	0	44.700.000	43.800.000	0	0	0	0	44.700.000	43.800.000	97,99	900.000	0	9. Akun	
052	Pelaksanaan Reviu				0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	100	0	0	7. Komponen	
052.B	Reviu RKA-KL				0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100	0	0	9. Akun	
052.C	Reviu Laporan Keuangan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun	
052.D	Reviu LAKIP				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun	
052.E	Reviu RKBMN				0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	100	0	0	9. Akun	
052.F	Reviu PIPK				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun	
053	Pelaksanaan Evaluasi				0	0	5.049.832.000	5.049.830.231	0	0	0	0	5.049.832.000	5.049.830.231	100	1.769	0	7. Komponen	
053.A	Penyusunan Pedoman				0	0	120.844.000	120.844.000	0	0	0	0	120.844.000	120.844.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				0	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000	5.700.000	100	0	0	9. Akun	
522151	Belanja Jasa Profesi				0	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	100	0	0	9. Akun	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				0	0	108.844.000	108.844.000	0	0	0	0	108.844.000	108.844.000	100	0	0	9. Akun	
053.B	Pelatihan Kantor Sendiri				0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
522151	Belanja Jasa Profesi				0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100	0	0	9. Akun	
053.C	Evaluasi SAKIP				0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	100	0	0	9. Akun	
053.D	Evaluasi SPIP				0	0	105.356.000	105.356.000	0	0	0	0	105.356.000	105.356.000	100	0	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100	0	0	9. Akun	
522151	Belanja Jasa Profesi				0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100	0	0	9. Akun	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				0	0	96.756.000	96.756.000	0	0	0	0	96.756.000	96.756.000	100	0	0	9. Akun	
053.E	Evaluasi Manajemen Risiko				0	0	518.007.000	518.006.221	0	0	0	0	518.007.000	518.006.221	100	779	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	100	0	0	9. Akun	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0	0	503.507.000	503.506.221	0	0	0	0	503.507.000	503.506.221	100	779	0	9. Akun	
053.F	Evaluasi Zi-WBK/WBMM				0	0	1.396.586.000	1.396.585.555	0	0	0	0	1.396.586.000	1.396.585.555	100	445	0	8. Sub Komponen	
521211	Belanja Bahan				0	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	22.500.000	100	0	0	9. Akun	

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total			Sisa Anggaran	Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	49.950.000	49.950.000	0	0	0	0	49.950.000	49.950.000	100	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	955.176.000	955.175.555	0	0	0	0	955.176.000	955.175.555	100	445	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	126.680.000	126.680.000	0	0	0	0	126.680.000	126.680.000	100	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	236.880.000	236.880.000	0	0	0	0	236.880.000	236.880.000	100	0	0	9. Akun
053.G	Evaluasi Dana Transfer Daerah					0	0	2.904.939.000	2.904.938.455	0	0	0	0	2.904.939.000	2.904.938.455	100	545	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	63.923.000	63.923.000	0	0	0	0	63.923.000	63.923.000	100	0	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	92.500.000	92.500.000	0	0	0	0	92.500.000	92.500.000	100	0	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	29.950.000	29.950.000	0	0	0	0	29.950.000	29.950.000	100	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	82.400.000	82.400.000	0	0	0	0	82.400.000	82.400.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	2.520.446.000	2.520.445.455	0	0	0	0	2.520.446.000	2.520.445.455	100	545	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	115.720.000	115.720.000	0	0	0	0	115.720.000	115.720.000	100	0	0	9. Akun
054	Pelaksanaan Pemantauan					0	0	8.483.314.000	8.477.306.158	0	0	0	0	8.483.314.000	8.477.306.158	99,93	6.007.842	0	7. Komponen
054.A	Penyusunan Pedoman					0	0	1.083.254.000	1.083.254.000	0	0	0	0	1.083.254.000	1.083.254.000	100	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	100	0	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	45.200.000	45.200.000	0	0	0	0	45.200.000	45.200.000	100	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	94.400.000	94.400.000	0	0	0	0	94.400.000	94.400.000	100	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	923.654.000	923.654.000	0	0	0	0	923.654.000	923.654.000	100	0	0	9. Akun
054.B	Pelatihan Kantor Sendiri					0	0	4.480.000	4.480.000	0	0	0	0	4.480.000	4.480.000	100	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	4.480.000	4.480.000	0	0	0	0	4.480.000	4.480.000	100	0	0	9. Akun
054.D	Pemantauan Dana Transfer Daerah					0	0	4.309.584.000	4.309.577.957	0	0	0	0	4.309.584.000	4.309.577.957	100	6.043	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	31.241.000	31.241.000	0	0	0	0	31.241.000	31.241.000	100	0	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	29.560.000	29.560.000	0	0	0	0	29.560.000	29.560.000	100	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	68.000.000	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	68.000.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	3.817.349.000	3.817.342.957	0	0	0	0	3.817.349.000	3.817.342.957	100	6.043	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	246.414.000	246.414.000	0	0	0	0	246.414.000	246.414.000	100	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	117.020.000	117.020.000	0	0	0	0	117.020.000	117.020.000	100	0	0	9. Akun
054.E	Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian					0	0	2.843.800.000	2.840.298.201	0	0	0	0	2.843.800.000	2.840.298.201	99,88	3.501.799	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	100	0	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	46.450.000	46.450.000	0	0	0	0	46.450.000	46.450.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	2.782.350.000	2.778.848.201	0	0	0	0	2.782.350.000	2.778.848.201	99,87	3.501.799	0	9. Akun
054.G	Ekspose					0	0	242.196.000	239.696.000	0	0	0	0	242.196.000	239.696.000	98,97	2.500.000	0	8. Sub Komponen
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	100	0	0	9. Akun
521211	Belanja Bahan					0	0	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	5.000.000	2.500.000	50	2.500.000	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	20.700.000	20.700.000	0	0	0	0	20.700.000	20.700.000	100	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	106.320.000	106.320.000	0	0	0	0	106.320.000	106.320.000	100	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	103.176.000	103.176.000	0	0	0	0	103.176.000	103.176.000	100	0	0	9. Akun
055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya					0	0	640.997.000	640.995.684	0	0	0	0	640.997.000	640.995.684	100	1.316	0	7. Komponen
055.B	Pendampingan Penerapan SPIP					0	0	419.392.000	419.391.334	0	0	0	0	419.392.000	419.391.334	100	666	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	9.920.000	9.920.000	0	0	0	0	9.920.000	9.920.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	406.972.000	406.971.334	0	0	0	0	406.972.000	406.971.334	100	666	0	9. Akun
055.C	Pendampingan Penguatan SPI Satuan Kerja					0	0	221.605.000	221.604.350	0	0	0	0	221.605.000	221.604.350	100	650	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100	0	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	9.920.000	9.920.000	0	0	0	0	9.920.000	9.920.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	209.185.000	209.184.350	0	0	0	0	209.185.000	209.184.350	100	650	0	9. Akun
056	Dukungan Operasional Pengawasan Internal					0	0	935.571.000	931.431.000	0	0	0	0	935.571.000	931.431.000	99,56	4.140.000	0	7. Komponen
056.A	Evaluasi Program dan Anggaran Inspektorat II					0	0	512.011.000	512.011.000	0	0	0	0	512.011.000	512.011.000	100	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	51.527.000	51.527.000	0	0	0	0	51.527.000	51.527.000	100	0	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000	100	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000	9.150.000	100	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	434.634.000	434.634.000	0	0	0	0	434.634.000	434.634.000	100	0	0	9. Akun
056.B	Ketatausahaan					0	0	423.560.000	419.420.000	0	0	0	0	423.560.000	419.420.000	99,02	4.140.000	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	53.050.000	48.910.000	0	0	0	0	53.050.000	48.910.000	92,2	4.140.000	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000	9.150.000	100	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	0	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000	100	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0	0	354.910.000	354.910.000	0	0	0	0	354.910.000	354.910.000	100	0	0	9. Akun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon 021-5737104
Laman www.itjen.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II
TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat II untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat II. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur III

Bernard Purba

NIP 196305221998021001

Catatan Hasil Pendampingan (CHP) Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)

INSPEKTORAT 2 Tahun 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Inspektorat Jenderal	Tgl.Pendampingan: 24 Januari 2021	Disusun oleh: Cucu Nurlaela
	Direviu oleh	Hudi Sulistyoy
	Disetujui oleh Auditor Utama	Riem Rayni

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat 2 Itjen Kemendikbudristek

Catatan Hasil Pendampingan

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2021, sudah selesai dibuat, sistematika sudah sesuai, isi laporan telah terurai dan tersusun secara lengkap sesuai PERMENPAN-RB N0. 53 Tahun 2014, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Pada Kata Pengantar:

- a. Penambahan kata 'Itjen Kemendikbudristek' disetiap kata 'Inspektorat II'
- b. Penambahan kalimat 'PermenPan-RB No.53 Tahun 2014, bahwa Laporan Kinerja (Lapkin) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.'
- c. Kata Kemendikbud diganti menjadi kemendikbudristek
- d. Pelaksanaan program (P nya jadi kecil) jadi pelaksanaan program.
- e. 'Kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan' ditambahkan riset dan teknologi.

2. Terkait Ikhtisar Eksekutif:

- a. Pencoretan kata double yaitu 'daya serap'
- b. Pada Paragraf ke 1: ditambahkan kata sampai dengan '31 Desember 2021'
- c. Pada Paragraf ke 3: ditambahkan kata 'bulan' dari kalimat 'dari bulan januari sampai dengan bulan Desember'.
- d. Pencoretan kata 'pada'
- e. Kata 'agar' diganti menjadi 'dapat'
- f. Pada paragraf ke 2 perlu disinggung tentang capaian kinerja yang tertuang dalam PK, misal: IKK 1 capaian sekian, IKK 2 capaian sekian, langsung melihat tabel PK yang diambil dari bab 3)
- g. Untuk Daftar isi agar disesuaikan dari koreksi yang sudah dibuat sebelumnya

3. Terkait BAB I: Pendahuluan

Gambaran umum:

- a. Penambahan kata 'Itjen Kemendikbudristek' disetiap kata 'Inspektorat II'
- b. Renstra yang dipakai adalah renstra Itjen Kemdikbudristek 2020-2024

Dasar Hukum:

- a. Perlu ditambahkan Permendikbud No. 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemendikbudristek
- b. Tugas dan Fungsi serta stuktur organisasi dari nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kemendikbud diganti No. 28 Tahun 2021

4. Terkait BAB II: Perencanaan Kinerja

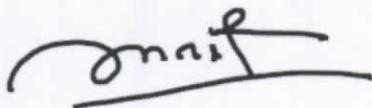
Perlu ditampilkan matriks target dalam renstra tahun 2020-2024

5. Ditambahkan dan diuraikan tujuan strategis, RPJMN, matriks renstra 2020-2024, perjanjian kerja dan RKT) contoh: dijadikan poin A adalah tujuan, poin B adalah RPJMN, poin C adalah Perjanjian Kinerja, Alokasi Anggaran
6. **Terkait BAB III: Akuntabilitas Kinerja**
Diperlukan grafik/table/diagram perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan dibandingkan dengan akhir tahun renstra pada setiap IKK.
7. **Terkait Permasalahan:**
 - a. Penghapusan kata 'dokumentasi/database' di no 5 dalam rekomendasi perbaikan menjadi penyelesaian laporan hasil audit, pemantauan, revidi belum tertib
 - b. Penghapusan kalimat no 6 dalam rekomendasi perbaikan yang bertuliskan 'Keterlambatan petugas audit menyampaikan Laporan Hasil Audit'
8. **Terkait Rekomendasi perbaikan:**
 - a. Penambahan kalimat pada No. 4 yaitu Peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
 - b. Penghapusan kalimat no 6 dalam rekomendasi perbaikan yang bertuliskan 'Meningkatkan moral dalam bekerja'
 - c. Perubahan pada kalimat No. 5 menjadi 'meningkatkan peran dan fungsi auditor dalam melakukan revidi laporan secara berjenjang'.
9. **Terkait Pengisian Format Lakin Insp II: (terlampir)**

Koreksi/Perbaikan:

Kepada Inspektur 2 Itjen Kemendikbudristek agar menginstruksikan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2021 untuk segera memperbaiki/menyempurnakan laporan kinerja disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan akhir tahun berjalan dilengkapi dengan data dan informasi yang handal dan akuntabel.

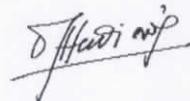
Auditor Utama



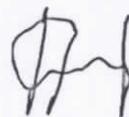
Riem Rayni
NIP196207181988022001

Jakarta, 24 Januari 2021

Tim Revidi



Hudi Sulisty
NIP 196510271990011001



Cucu Nurlaela
NIP 196710131988122001